

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan/atau Sumber Lainnya

- Arman, A., Marsuki, & Slikipli. (2018). Model Pengembangan Bumdes Melalui Kemitraan Perguruan Tinggi dan Perbankan. *Memperkuat Produktivitas Untuk Ketahanan Ekonomi Nasional*.
- Chaplin, J. . (1989). *Kamus Lengkap Psikologi*. Terj. Dr. Kartono dan Kartini. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dina, Fitriani W, & Putu, M. A. S. (2009). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *EJurnal Universitas Brawijaya*, 3. <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/128>
- Greuning, Hennie Van., Scott, Darrel., dan Terblanche, S. (2013). *International Financial Reporting Standards* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Gunadi. (2008). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Salemba Empat.
- Handayani, O. (2020). Hukum pajak. *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–60.
- Handoko, T. H. (1999). *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi* (Edisi 7). BPFE.
- Harsono, B., & Damar, H. (2020). Inklusifitas Kepala Desa Dalam Mendukung Penerimaan Negara Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Panggunharjo). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 16.
- Martani, Dwi., Siregar, Sylvia Veronica., Wardhani, Ratna., Farahmita, A., & Tanujaya, Adward., dan H. T. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 2*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

- Purwaka, T. H. (2011). Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 117–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>
- Purwanto, H. (1999). *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. EGC. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20131097>
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Ridwan Halim, A. (1985). *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab* (Cetakan Ke). Ghalia Indonesia.
- Samsudin, S. (1977). *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture*. Banacipta.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Cetakan 1). Rineka Cipta.
- Subejo. (2010). *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture* (Edisi Dua). Bumi Aksara.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Rajawali Pers.

II. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan

- Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang*

Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Journal of Experimental Psychology: General* (Vol. 136, Issue 1, pp. 23–42). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. In *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara.